

## BAB IV

### 4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program ARISE+ Indonesia merupakan instrumen strategis yang melampaui sekadar bantuan teknis konvensional; ia adalah perpanjangan tangan dari tata kelola eksternal UE (*EU External Governance*) yang berhasil mengekspor standar dan model regulasi ke dalam sistem domestik Indonesia. Melalui mekanisme yang terstruktur, UE telah menunjukkan kapasitasnya sebagai kekuatan regulasi yang mampu memengaruhi arsitektur perdagangan negara mitra bukan melalui koersi, melainkan melalui penyelarasan kepentingan teknokratis. Keberhasilan ini terlihat jelas dalam dua tahapan krusial, yaitu fase adopsi aturan (*rule adoption*) yang melegitimasi standar eksternal ke dalam hukum nasional, serta fase penerapan aturan (*rule application*) yang mentransformasi teks hukum tersebut menjadi praktik birokrasi yang operasional.

Dalam fase adopsi, integrasi norma UE telah berhasil menyusup ke dalam hierarki peraturan di Indonesia, mulai dari standardisasi produk, transparansi informasi digital, hingga prosedur kepabeanan. Fenomena ini membuktikan bahwa Indonesia telah melakukan sinkronisasi regulasi secara sukarela demi mendapatkan kepastian akses pasar. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan pasar UE bekerja secara efektif ketika standar yang mereka tawarkan dianggap sebagai solusi atas hambatan perdagangan domestik. Dengan diterimanya standar-standar ini sebagai bagian dari regulasi nasional, Indonesia secara praktis telah mempersempit jarak regulasi dengan

UE, yang pada gilirannya menciptakan ketergantungan fungsional yang menguntungkan bagi stabilitas perdagangan bilateral.

Namun, signifikansi utama dari ARISE+ terletak pada fase penerapan aturan di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan transfer aturan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur birokrasi dan kapasitas sumber daya manusia. Melalui modernisasi sistem seperti INSW dan penguatan skema AEO, transformasi yang terjadi tidak lagi hanya bersifat administratif di atas kertas, melainkan telah mengubah perilaku organisasi pemerintah menjadi lebih transparan dan efisien. Keberadaan komite koordinasi seperti NTFC menjadi pengunci seluruh rangkaian reformasi ini, memastikan bahwa ego sektoral antar-lembaga dapat diredam demi menjaga konsistensi standar yang telah diadopsi.

Secara keseluruhan, ARISE+ Indonesia membuktikan bahwa External Governance UE paling efektif ketika bekerja melalui jalur jaringan administrasi yang inklusif. Dengan membangun ekosistem perdagangan yang kompatibel, UE tidak hanya mempermudah arus barangnya sendiri, tetapi juga membantu Indonesia meningkatkan daya saing globalnya melalui adopsi praktik terbaik internasional. Pada akhirnya, program ini menciptakan sebuah "area regulasi bersama" yang menempatkan Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki kesamaan bahasa teknis dan administratif dengan pasar tunggal Eropa, sekaligus memperkuat posisi UE sebagai pembuat standar global yang dominan.

## 4.2 Saran

Penelitian ini memberikan dasar pemahaman mengenai bagaimana transfer regulasi UE bekerja di Indonesia, namun masih terdapat ruang luas bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam kajian ini, terutama dari sisi dampak ekonomi makro. Penelitian mendatang disarankan untuk melakukan analisis kuantitatif guna mengukur korelasi antara efisiensi birokrasi yang dihasilkan oleh program ARISE+ dengan peningkatan volume ekspor riil komoditas unggulan Indonesia ke pasar tunggal Eropa. Hal ini penting untuk membuktikan apakah sinkronisasi aturan secara teknokratis benar-benar berujung pada keuntungan ekonomi yang signifikan bagi neraca perdagangan nasional. Selain itu, studi komparatif dengan negara anggota ASEAN lainnya, seperti Vietnam atau Thailand, juga sangat dianjurkan untuk melihat bagaimana perbedaan struktur politik domestik memengaruhi kecepatan dan kedalaman penyerapan aturan eksternal tersebut.

Selanjutnya, fokus penelitian dapat diperluas dengan melibatkan perspektif aktor non-negara, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Peneliti selanjutnya dapat menelaah sejauh mana kemudahan prosedural dan standar teknis yang telah diadopsi pemerintah benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh para eksportir di lapangan, atau justru menciptakan hambatan baru dalam hal biaya kepatuhan. Terkait keberlanjutan program, penting bagi studi masa depan untuk mengevaluasi konsistensi birokrasi Indonesia dalam mempertahankan standar tersebut setelah masa pendampingan teknis UE berakhir. Terakhir, di tengah dinamika

geopolitik global, penelitian selanjutnya perlu melihat bagaimana Indonesia menavigasi potensi benturan standar antara UE dengan kekuatan ekonomi lain seperti Tiongkok atau Amerika Serikat, guna memastikan bahwa adopsi aturan eksternal tetap berjalan selaras dengan kepentingan strategis nasional.